

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP)  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus Pinjaman Dana Bergulir di Kelurahan Padang Besi  
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)**

**Muhammad Rusli**  
Program Studi PGSD  
STIKIP Muhammadiyah Manokwari  
[kotakupabar@gmail.com](mailto:kotakupabar@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Implementation of the National Program for Community Empowerment Urban (PNPM-MP) in Poverty Reduction Revolving Fund Loan Case Study in the village of Padang Besi Padang Kota sub-district Kilangan Lubuk. Poverty is a multidimensional problem that can be viewed from various angles. Poverty is also linked with the limitations of social rights, economic, political and causing vulnerability, adversity, and helplessness. The purpose of this study was Describes implementation of activities revolving fund in PNPM Urban program in the village of Padang Besi, as well as those aspects that bring kasadaran community in economic returns rolling in the village of Padang Besi. In accordance with the objectives of this research, we used qualitative descriptive method. Techniques and mechanisms to get informants intentional or (purposive) means that researchers establish certain criteria that must be met by those who used as a source of information, where the identity of the person known to be a source of information, so as to guarantee the validity of the data collected. The theory used in this research is the theory of modernization, as a tool of analysis of the findings related to the field on a revolving loan fund PNPM Urban in order to reduce poverty in the village of Padang Padang Besi West Sumatra province, where the collection of data used in-depth interviews, observation, and documentation. Based on the results of this study concluded that, very much a revolving loan fund to help the poor in the capital and business development, which can increase their income, as well as a learning tool to help each other and mobilize their potential, as well as media mutual trust, transparency and mutual responsibility , The things that cause rolling refund rate is quite high because of the leadership that is rooted in the community that have properties that can emulate both the MFI Pearl or at KSM which provide role models for society, as well as rules that have been agreed that joint liability collectively in activities revolving loan fund as well as their sense of community and culture of helping each other.*

*Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir pada program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Padang Besi dan aspek-aspek yang memunculkan kasadaran masyarakat dalam pengembalian ekonomi bergulir di Kelurahan Padang Besi.*

*Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dan mekanisme mendapatkan informan disengaja atau (purposive) artinya peneliti*

menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi, dimana diketahui identitas orang yang menjadi sumber informasi, sehingga dapat menjamin validitas data yang dikumpulkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Modernisasi, Sebagai alat analisis dari temuan-temuan lapangan terkait dengan pinjaman dana bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Padang Besi Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dimana pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pinjaman dana bergulir sangat banyak membantu masyarakat miskin dalam permodalan serta pengembangan usaha, dimana dapat meningkatkan pendapatan mereka, serta sebagai sarana belajar untuk saling membantu dan menggalang potensi yang mereka miliki, serta media saling percaya, transparan dan saling bertanggungjawab. Adapun hal-hal yang menyebabkan tingkat pengembalian dana bergulir cukup tinggi adalah karena adanya kepemimpinan yang mengakar dimasyarakat yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diteladani baik di LKM Mutiara maupun di KSM yang memberikan panutan bagi masyarakat, serta aturan-aturan yang telah disepakati yaitu tanggung renteng secara bersama dalam kegiatan pinjaman dana bergulir serta adanya rasa kebersamaan dan budaya saling membantu satu sama lainnya.

**Kata kunci :** Pemberdayaan, Kemiskinan, Pinjaman, Dana Bergulir, Teori Modernisasi

## 1. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 27 dan 34 UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Lebih tegas lagi, pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dan perubahannya menugaskan kepada Negara untuk menyelenggarakan "Sistem Jaminan Sosial" bagi seluruh rakyat" (Suparjan, 2003:148). Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Di sadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi Politik, Sosial, Ekonomi, dan Aset. dan lain-lain. Di dalam Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2012:12) menyatakan bahwa dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk antara lain :

- **Dimensi Politik**, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi

yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;

- **Dimensi Sosial** sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
- **Dimensi Lingkungan** sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
- **Dimensi Ekonomi** muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan

- **Dimensi Aset**, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk tentu memberikan dampak positif akan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak terhadap permasalahan sosial, terutama masalah kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, sekitar 30.018.930 Jiwa atau sekitar 12,49%, sementara untuk propinsi Sumatera Barat jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 443.363 jiwa. Kalau kita lihat data yang ada sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 10,67% pada tahun 2008 menjadi 9,54% pada tahun 2009, kemudian menjadi 9,50% di tahun 2010, dan pada tahun 2011 turun menjadi 9,04%. Kondisi ini terjadi tentu karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta adanya program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli akan masalah-masalah kemiskinan.

Kota Padang merupakan salah satu sasaran dari program PNPM Mandiri Perkotaan dimana luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Padang sebesar 847.123 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki 422.256 jiwa dan perempuan 424,867 jiwa. Sementara jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Padang sebesar 52,963 jiwa atau sekitar 6,25%. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang di mulai sejak tahun 2006 di 8 kelurahan, Tahun 2007 di 30 Kelurahan, Tahun 2008 di 55 Kelurahan dan sampai tahun 2009 di 104 Kelurahan sasaran.

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mengacu pada konsep tridaya yaitu

Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*), Pengembangan Masyarakat (*Sosial Development*), Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*). Namun dalam penelitian ini difokuskan dalam pengembangan ekonomi yang merupakan bidang yang paling langsung memberikan manfaat, yang dalam hal ini pinjaman dana bergulir yang memberikan akses pelayanan permodalan bagi masyarakat khususnya warga miskin untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Pengembangan ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir dalam rangka meningkatkan : 1). Meningkatkan omzet usaha, pendapatan dan modal sendiri, 2). Meningkatkan Aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga miskin, 3). Kegiatan pinjaman bergulir tidak merusak tatanam lembaga keuangan mikro yang sudah ada. Dalam penelitian ini penulis fokus pada kegiatan pengembangan ekonomi yang terkait dengan pinjaman dana bergulir. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di kecamatan Lubuk Kilangan dilaksanakan pada bulan oktober 2009, dimana tahap-tahap awal adalah sosialisasi program kepada masyarakat yang dilaksanakan ditingkat basis atau tingkat Rt, dengan harapan semua masyarakat paham dan tau tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Dari tahapan sosialisasi tersebut diperkenalkan program-program PNPM Mandiri Perkotaan berupa program lingkungan, program sosial serta program pinjaman dana bergulir. Pelaksanaan pengembangan pinjaman dana bergulir dimulai dari bulan Maret tahun 2010 di Kecamatan Lubuk Kilangan dan di tujuh kelurahan yaitu kelurahan Koto Lalang, Kelurahan Bandar Buat, kelurahan Padang Besi, Kelurahan Inderung, kelurahan Batu Gadang, kelurahan Baringin dan kelurahan Tarantang.

Dari data menunjukkan bahwa dari tujuh kelurahan yang ada di kecamatan Lubuk Kilangan, kelurahan Padang Besi menempati Tingkat Pengembalian (*Repayment Rate*) paling tertinggi dari tahun 2010 sampai dengan 2013 pada posisi 100% pinjaman dana bergulir dikembalikan kepada Unit Pengelola Keuangan. Hal lain yang menarik adalah sebelum program muncul dikelurahan Padang Besi, sudah banyak program pinjaman dana bergulir akan tetapi semuanya mengalami kegagalan, dan saat ini pinjaman dana bergulir yang di kelola oleh LKM Mutiara serta Program KJKS berjalan lancar, ini berarti ada perubahan-perubahan sikap dan perilaku masyarakat, dan PNPM Mandiri perkotaan dalam melaksanakan program

sasarannya adalah perubahan sikap dan perilaku. Dari pelaksanaan pinjaman dana bergulir sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 telah terjadi perubahan sikap dan perilaku serta pola pikir masyarakat yang positif, ini dibuktikan dengan tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir secara berturut-turut 100%, ini semua tidak terlepas dari semua pelaku program serta sosialisasi program, dimana substansi dari program adalah bagaimana pesan-pesan moral berupa kejujuran, kebersamaan, kepedulian, kegotong royongan, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas dapat di implementasikan melalui proses belajar pinjaman dana bergulir.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara Konseptual pemberdayaan atau Pemberkuasaan (*Empowerment*) berasal dari kata "*Power*" (kekuasaan dan keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan atau kebutuhan serta minat mereka. Ilmu sosial tradisinal mene kan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control, pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sbagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah, Kekuasaan senantiasa selalu hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman seperti ini maka pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Menurut Suharto (2006:58) Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis,

Menurut Suparlan (1993:xi) bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu Suharto (2009:16) berpendapat bahwa kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang,

baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Pendapat mengenai kebutuhan manusia diuraikan pula Sumardi (1985:2). di dalam Sumardi bahwa kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar atau *basic human needs* dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan, perumahan, pakain) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan). Menurut Emil Salim dalam Hartomo (2004:329) mengatakan bahwa kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, atau dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan pendidikan, pendapatan, sarana sosial yang tidak memadai, sehingga produktivitasnya juga rendah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, bagaimana masyarakat untuk menanbung, lalu kalau tidak bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya, tentu tidak ada tabungan, yang menyebabkan tidak ada investasi

Menurut Sugeng ( Agung Laksono dkk, 2013 : 70 ) bahwa kemiskinan bersifat Multidimensi, bukan hanya faktor ekonomi, tetapi faktor sosial budaya dan politik, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Terbatasnya kesempatan Kerja dan berusaha
2. Terbatasnya Akses terhadap Faktor Produksi
3. Rendahnya Kepemilikan Aset
4. Kurangnya Akses terhadap Fasilitas Pendidikan
5. Kurangnya Akses terhadap Fasilitas Kesehatan
6. Terhambatnya Mobilitas Sosial dan Kurangnya Partisipasi
7. Kelemahan Tata Pemerintahan
8. Lemahnya Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
9. Konflik social
10. Bencana Alam

Seorang Sosiolog tersohor yang berkebangsaan Inggris, Giddens

(Afrizal dkk, 2006:10) mengelompokkan Teori Kemiskinan dalam dua Perspektif sebagai berikut :

1. Perspektif yang memandang orang miskin bertanggungjawab atas kemiskinannya itu sendiri, ini cenderung menyalahkan orang miskin dimana kekurangan motivasi dan keterampilan yang dimiliki oleh individu-individu
2. Perspektif yang memandang kemiskinan adalah hasil dari kekuatan-kekuatan structural dalam masyarakat. Perspektif yang kedua lebih cenderung diakibatkan oleh system, dimana orang miskin tidak berdaya atas untuk mengatasinya.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 2 bahwa :

- 1) Arah kebijakan Penanggulangan kemiskinan Nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) Arah Kebijakan Penanggulangan kemiskina daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Proses Modernisasi telah menunjukkan suatu yang selalu melekat (inheren) dalam latar (setting) historis yang berbeda kearah alinasi, tenaga kerja, atomisasi masyarakat, birokratisasi penguasa, dan homogenisasi kebudayaan. Freire dalam Nasution (2004:92) yang terkenal dengan gagasannya "*Pembangunan sebagai suatu pembebasan*" pada hakekatnya pembebasan dimaksudkan untuk memerdekakan rakyat dari kungkungan kebodohan, melalui pencerdasan seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, ini sejalan dengan pendapat Illich dalam Nasution (2004:92) dengan konsep dunia ketiga, mengatakan bahwa pendidikan sebagai komponen yang dominan dalam menafsirkan pembangunan.

Ada beberapa teori yang tergolong dalam kelompok teori modernisasi menurut Budiman (2000:18-34) antara lain :

#### 1. Teori Harrod-Domar : Tabungan dan Investasi

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai saat ini masih terus eksis, meskipun telah dikembangkan secara canggih, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi, Seperti yang dikatakan oleh Bloostrom dan Hettne dalam Budiman (2000:19) :

“Melihat perbedaan yang tampak antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam-macam dari asfek keterbelakangan. Persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan, yakni kekurangan modal.”

Oleh karena itu resep para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri). Jadi intinya adalah kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama dalam pembangunan.

#### 2. Max Weber Etika Protestan

Perbedaan dengan teori Harrod-Domar, teori Max Weber mempersoalkan masalah manusianya yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya disekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Max Weber adalah bapak sosiologi modern, dimana Max Weber mengatakan bahwa peran agama menjadi faktor yang menyebabkan

munculnya kapitalis di Eropa, Barat dan Amerika Serikat, dimana dalam bukunya yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Max Weber mencoba menjawab pertanyaan mengapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat dibawah sistem kapitalisme, ternyata hasil analisis Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai *Etika Protestan*.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan teori yang digunakan dan sifat data yang dikumpulkan yaitu ungkapan melalui wawancara mendalam. Sebagaimana yang jelaskan Afrizal (2008:37) bahwa alasan-alasan pemilihan penggunaan metode penelitian kualitatif sebaiknya dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu : 1) pertimbangan teori, (2) pertimbangan sifat data yang akan dikumpulkan, (3) pertimbangan pragmatis. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1981:22). Penulis juga menginterpretasikan atau menterjemahkan informasi lapangan dengan bahasa penulis sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada.

Sejalan dengan itu menurut Emzir (2010:2-4), bahwa penelitian kualitatif mempunyai karakteristik naturalistik, data deskriptif, berurusan dengan proses, induktif, dan makna. Sejalan dengan Afrizal (2008:43) bahwa metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor. Sejalan dengan penjabaran konsep dan penerapannya yang telah dibahas sebelumnya, penulis berharap dengan menggunakan teori modernisasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis dari temuan-temuan penulis terkait dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan Padang Besi. Pemilihan informan sangat dipengaruhi oleh diketahui atau tidak diketahuinya kriteria informan yang akan dijadikan sumber informasi oleh peneliti. Menurut Afrizal (2010:101) ada dua cara untuk memilih Informan dalam penelitian Kualitatif :

1. Mekanisme disengaja atau (*purposive*) artinya para peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi, dimana peneliti mengetahui identitas orang yang akan menjadi sumber informasi, sehingga dapat menjamin validitas data yang akan dikumpulkan.
2. Mekanisme gelinding bola salju (*snowballing*) artinya mekanisme pencarian para informan penelitian dilakukan apabila sipeneliti tidak mengetahui Kriteria siapa saja yang dapat di wawancarai untuk mendapatkan informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *pusposive* atau mekanisme disengaja dimana peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi, dimana peneliti mengetahui identitas orang yang akan menjadi sumber informasi, sehingga dapat menjamin validitas data yang akan dikumpulkan, dengan memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut, situasi sosial yang dimaksud adalah Tempat (Place), Pelaku (Actor) dan Aktivitas (Activity), Menurut Sugiyono (2008:52) Penentuan sumber data dengan Memilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu :

- a. Peneliti mengetahui dengan baik narasumber yang benar-benar mengerti kegiatan LKM Mutiara.
- b. Narasumber yang representatif pada populasinya atau dianggap mengerti dalam lingkup penelitian yang diangkat, sehingga akan menghemat waktu dan biaya.
- c. Diperoleh narasumber yang benar-benar mengerti dan menggeluti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Padang Besi, sehingga akan didapat data sesuai dengan topik atau fokus penelitian serta validitas data yang akurat sesuai yang di harapkan.
- d. Memilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu

Langkah-langkah yang digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini adalah: 1). Informan awal atau informan kunci, adalah koordinator LKM dan beberapa orang anggotanya. 2). Informan lanjutan guna memperluas diskripsi

informasi dari unsur Unit Pengelola Keuangan yang bertanggungjawab penuh terkait pinjaman dan pengembalian dana bergulir, serta KSM yaitu ketua dan anggota KSM, Tokoh Masyarakat dan pemerintahan kelurahan, juga Fasilitator Ekonomi yang selalu mendampingi, Asisten Korkot Bidang Ekonomi dan Korkot PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang sebagai penanggungjawab Program di tingkat Kota Padang. Syarat-syarat yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah yang berdomisili di wilayah Kelurahan Padang Besi serta terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan juga informan dari konsultan yang selalu memberikan pendampingan. Agar informasi yang diperoleh sesuai dengan harapan peneliti, maka informan dibatasi dengan beberapa syarat-syarat, antara lain:

1. Laki-laki atau perempuan (umur > 17 tahun).
2. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar.
3. Berdomisili di Kelurahan Padang Besi
4. Terlibat langsung (penerima Manfaat dari Dana Bergulir) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.

Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 14 orang sesuai dengan kompleksitas masalah pada penelitian, hal ini peneliti tentukan sendiri dengan teknik *purposive* atau teknik yang disengaja. Langkah-langkah yang digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini adalah:

- a. Pemilihan informan awal atau informan kunci, adalah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- b. Pemilihan informan selanjutnya adalah Unit Pengelola Keuangan yang merupakan penanggungjawab kegiatan pinjaman dana bergulir.
- c. Pemilihan informan lanjutan guna memperluas diskripsi informasi dari unsur anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Mutiara, tokoh masyarakat serta pemerintahan kelurahan Padang Besi.
- d. Pemilihan informan selanjutnya untuk melengkapi hasil temuan dilapangan adalah fasilitator, dalam hal ini fasilitator pendamping masyarakat bidang ekonomi, asisten korkot bidang ekonomi serta korkot PNPM Mandiri sebagai penanggungjawab program di tingkat Kota Padang.
- e. Menghentikan pemilihan informan lanjutan bilamana dianggap sudah tidak

ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi perolehan informasi).

Sesuai dengan kegunaannya untuk mengungkapkan proses pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan secara mendetail dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang di kaji, menurut Marzuki, (2002:55-56) bahwa informasi atau data dapat dibedakan antara lain data sekunder dan data primer, antara lain :

1. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Pusat Statistik, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh program.

2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara mendalam dengan memakai panduan wawancara, diamati dan dicatat, dimana informan yang diwawancarai adalah informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung, namun mengetahui program PNPM Mandiri Perkotaan. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

3. Wawancara mendalam

Melalui wawancara mendalam peneliti menggali ingatan dan pengalaman informan terkait dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dalam penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Peneliti mencatat dan merekam yang dituturkan informan dan menggali lebih dalam mengenai proses pelaksanaan pinjaman dana bergulir yang diketahui dan dialami serta menangkap kesan dan makna dari proses tersebut bagi informan.

Menurut Patton dalam Afrizal (2010:80) analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Teknik analisa data yang peneliti lakukan adalah (1) Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data

secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) kodifikasi, (3) kategorisasi, (4) pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakannya, (5) analisa dan penafsiran. Menurut Afrizal (2008:80) analisa data merupakan proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan data dengan cara mengklasifikasi data dan menghubungkan data satu sama lainnya. Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari hasil catatan Observasi, wawancara dan dokumen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, memiliki luas wilayah 493,65 Ha yang terbagi menjadi 4.RW dan 20 RT, dimana Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Limau manis Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baringin, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bandar Buat, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Indarung. Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai salah satu lokasi sasaran PNPM MP Kota Padang diintervensi sejak tahun 2009 dimana jumlah penduduk sebesar 6.098 Jiwa sementara angka kemiskinan 348 Jiwa atau sekitar 5,67%.

Dalam bagian ini diuraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir pada program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Padang Besi, Aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pengembalian pinjaman dana bergulir pada program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Padang Besi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diadakan penelitian lapangan dengan maksud memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa BKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

1. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM

Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2.

2. Minimum 30% peminjam adalah perempuan
3. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang.
4. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil channelling dan kebijakan pinjaman yang jelas.

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di masing-masing tataran antara lain :

1. Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanjutan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan.
2. Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap.
3. Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk.
4. Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimum yang transparan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator kinerja memuaskan dan indikator kinerja minimum.
5. Menunda penambahan dana apabila kegiatan operasional UPK tidak mencapai kriteria minimum, dan menutup UPK yang gagal mencapai kriteria minimum dalam waktu satu tahun setelah penundaan.
6. Membuat peringatan akan menutup UPK yang kinerjanya tidak memuaskan. Memperbaiki dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak.
7. Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelolaan Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendesain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan

dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir.

8. Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya.
9. LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan pinjaman serta memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang mengandung unsur pria dan wanita.

Adapun realisasi rencana kerja tahunan LKM Mutiara dari tahun 2010, dengan total BLM sebesar Rp. 250.000.000 untuk membiaya kegiatan tridaya, Dimana BLM Infrastruktur sebesar 180.000.000, sedangkan untuk kegiatan sosial sebesar Rp. 20.000.000, dan khusus untuk pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000, dengan penerima Manfaat sebanyak 8 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 80 orang.

Untuk realisasi rencana kerja LKM Mutiara tahun 2011 adalah total BLM sebesar Rp. 200.000.000 untuk membiaya kegiatan tridaya, Dimana BLM Infrastruktur sebesar 120.000.000, sedangkan untuk kegiatan sosial sebesar Rp. 20.000.000, dan khusus untuk pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 50.000.000, dengan penerima Manfaat sebanyak 7 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 65 orang.

Pada tahun 2012 LKM Mutiara mengelola BLM sebesar Rp. 305.000.000 untuk membiaya kegiatan tridaya, Dimana BLM Infrastruktur sebesar 129.000.000, sedangkan untuk kegiatan sosial sebesar Rp. 20.000.000, dan khusus untuk pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 146.000.000, dengan penerima Manfaat sebanyak 17 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 122 orang.

Untuk realisasi rencana kerja LKM Mutiara tahun 2013, LKM Mutiara mengelola BLM sebesar Rp. 355.000.000 untuk membiaya kegiatan tridaya, Dimana BLM Infrastruktur sebesar 135.000.000, sedangkan untuk kegiatan sosial sebesar Rp. 25.000.000, dan khusus untuk pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 185.000.000, dengan

penerima Manfaat sebanyak 15 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 123 orang.

Pinjaman dana bergulir sebagai investasi dan modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, maka masyarakat terdorong untuk melakukan pengembalian karena ada rangsangan bahwasanya program ini akan memberikan pinjaman lebih besar lagi ketika anggota KSM atau kelompok mengembalikan pinjaman sebelumnya secara lancar dan tepat waktu, hal ini dijelaskan oleh salah seorang anggota KSM di Kelurahan Padang Besi, ibu Syamsini berikut ini:

“...sebenarnya begini pak, kenapa anggota KSM kami lancar pembayaran, karena teman-teman anggota KSM mempunyai harapan supaya mendapatkan modal yang lebih besar setelah ini, kalau tahun ini pinjaman baru 500.000, kalau bisa di tahun-tahun berikutnya kami mendapatkan modal lebih besar, kalau bisa 5.000.000, sehingga kami bisa membeli mesin untuk usaha kami...”

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota LKM Mutiara Kelurahan Padang Besi ibu Bytom sebagai berikut ini:

“...program dana bergulir di Kelurahan Padang Besi sampai saat ini telah berjalan selama beberapa 4 tahun, sehingga dana di UPK pun sudah berkembang sesuai dengan harapan dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Pada awalnya dana yang dipinjamkan kepada masyarakat hanya 500.000, namun sekarang sudah bertambah menjadi 2.000.000, bahkan Kelurahan kita ini mendapat bantuan lagi dari PPMK sebanyak Rp. 100.000.000, sehingga ada beberapa KSM yang mendapatkan bantuan sampai 5.000.000 per anggota...”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, ini sesuai dengan teori Modernisasi yang dikemukakan oleh Teori Harrod-Domar (Arief Budiman, 2000:19) dengan konsep tabungan dan Investasi bahwa :

“...pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah.

Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi...”

Lebih lanjut Harrod-Domar, mengatakan bahwa terjadinya kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya tabungan dan investasi, sehingga salah satu sarana untuk mendorong masyarakat dapat berkembang melalui pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu, dimana lembaga-lembaga keuangan yang ada tidak dapat dijangkau, karena persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh karena keterbatasan aset. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa solusi dari pertumbuhan yang rendah adalah bagaimana modal tersebut dapat dipenuhi, salah satu cara adalah dengan mencari tambahan modal, baik dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri). Jadi intinya adalah kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama dalam pembangunan.

Terkait dengan program PNPM Mandiri Perkotaan, di masyarakat banyak asumsi-asumsi tentang pelaksanaan program, sebagaimana juga di katakan oleh Zulhardin Lurah Padang Besi, dimana dia mengatakan bahwa

“...Banyak asumsi atau pandangan-pandangan yang selama ini berkembang, bahwa PNPM Mandiri itu bangun jalan, memberikan modal kepada kelompok, supaya berdaya, supaya maju, supaya keluar dari kemiskinan, tapi penting PNPM Mandiri itu ada dalam rangka mencoba mentransformasi masyarakat itu dari ketidakberdayaan menjadi masyarakat yang berdaya...”

Dari uraian di atas maka tepat apa yang disampaikan oleh Alex Inkeles dan David H. Smith (Arief Budiman, 2000:34) dalam teori Modernisasi dengan konsep “Manusia Modern” bahwa :

“...faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan hanya perkara pemasokan modal dan teknologi, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material supaya menjadi produktif, maka dibutuhkan manusia modern. Manusia modern yang

dimaksud adalah tertuang dalam bukunya yang terkenal “ *Becoming Modern.*” Dimana ciri-ciri manusia modern adalah meliputi : keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia dapat menguasai alam, dan bukan sebaliknya...”

Teori Inkeles dan Smith tentang proses pembentukan manusia modern, mereka mengatakan bahwa :

“Kami beranggapan bahwa, bagaimanapun juga, manusia bisa diubah secara mendasar setelah dia menjadi dewasa, dan karena itu tak ada manusia yang tetap menjadi manusia tradisional dalam pandangan dan kepribadiannya hanya karena dia dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang tradisional.”

Dari uraian di atas, maka setiap orang harus dapat berkembang dengan baik bilamana mereka berada pada lingkungan yang tepat, setiap orang bisa diubah menjadi manusia modern setelah ia mencapai dewasa. Inkeles dan Smith mengatakan bahwa pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia, bahkan dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya, kemudian pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa.

Mengenai program ekonomi bergulir lebih lanjut ibu Suraida, ketua KSM Melati mengatakan:

“...program ekonomi bergulir adalah program yang sifatnya satu kelompok, dimana masing-masing kelompok diberikan pinjaman, ketika pinjaman itu sudah dikembalikan oleh kelompok itu, maka akan diberikan pula kepada anggota-anggota kelompok yang lainnya, nah ini yang disebut dengan bergulir, tujuan dari program ekonomi bergulir ini adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat...”

Lebih lanjut ibu Zuraidah mengatakan bahwa :

“...Kalau jujur tu harus disiplin, tepat waktu, harus sadar baso awak barutang. Adat basandi sarak sarak basandi

kitabullah, segala sesuatunya, kalau kita diberi kepercayaan atau amanah, kita harus dikembalikan, contohnya kita diberi pinjaman, kita harus jujur, tepat waktu membayar.”

Disamping itu diperkuat oleh anggota LKM Mutiara bapak Zulmar Rusdi bahwa program PNPM Mandiri :

“...sangat membantu masyarakat miskin dalam membantu modal usaha, dan sekarang terbukti bahwa masyarakat yang meminjam yang dikelompok-kelompokkan terbukti dapat menambah penghasilan, dimana cicilan pinjaman dapat berjalan lancar, karena jasanya ringan, pencairannya juga dimudahkan sesuai dengan aturan yang ada. Atas kelancaran cicilan pinjaman dari masyarakat pada tahun 2012, LKM mendapat bantuan modal usaha dari PNPM sebesar 100 juta, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan pinjaman dana bergulir....”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, ini sangat relevan dengan teori modernisasi yang dikemukakan oleh David McClelland dalam arief Budiman (2000:22-23) dengan konsep Dorongan Berprestasi atau *n-Ach* bahwa :

“...Untuk membuat suatu pekerjaan berhasil, yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut, persoalan terpenting menjadi: apakah seseorang memiliki semangat yang baru sempurna dalam menghadapi pekerjaannya, apakah dia punya keinginan untuk berhasil... dan kalau sebuah masyarakat ada banyak orang memiliki *n-Ach* yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi...”

Peran strategis program pemberdayaan ekonomi sebagai wasilah (sarana) bagi Warmis keluar dari kemiskinannya. Oleh karena itu akses Warmis terhadap program pemberdayaan ekonomi menjadi penting. Sebagaimana di ungkapkan oleh Manejer Unit Pengelola Keuangan (UPK) LKM Mutiara ibu Sri Adriani adalah:

“.... Bahwa sebelum KSM menerima Pinjaman dana bergulir, pihak UPK dan Fasilitator melakukan pelatihan, berupa pelatihan pembukuan agar anggota KSM

tau tentang pemasukan dan pengeluaran dari usaha yang dilakukannya, juga kita berikan pelatihan yang berkaitan dengan usaha mereka dengan bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu, misalnya penjahitan dari BLK, usaha kripik dari Perdagangan, serta pihak-pihak yang punya usaha sukses diminta untuk berbagi pengalaman....dan kami setiap dua hari sebelum jatuh tempo pembayaran, kami telpon ketua-ketua kelompok untuk mengingatkan, disamping itu terkadang kami bersama fasilitator turun menemui KSM sekaligus melihat perkembangan usahanya.....”

Ibu Yendrawati anggota KSM Melur mengungkapkan bahwa pengembangan usaha melalui pinjaman dana bergulir sangat membantu kami, dimana :

“pada waktu-waktu tertentu permintaan Sprei dan bed cover yang banyak, saya mengajak anggota KSM lainnya untuk ikut membantu sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Awalnya saya dapat pinjaman sebesar Rp.500.000 dan pada Nopember 2013 LKM memberi kesempatan pinjaman saya menjadi Rp. 5.000.000 dana tersebut saya pergunakan untuk membeli bahan dan alat. Sebelumnya saya hanya dapat membuat 5 macam Sprei/bed cover dalam sebulan karena modal kurang, dimana bahan-bahan tersebut sekarang naik harganya, dengan pendapatan rata-rata Rp. 100.000. sekarang telah dapat membuat 10 – 20 buah dengan pendapatan rata-rata perhari Rp. 150.000 – 400.000, Pemasaran kami melalui pesanan dan saat-saat tertentu di kirim ke Pekanbaru dengan harga Bed Cover Rp. 250.000 per buah dan sprei dengan harga antara Rp. 150.000 – 200.000, dan barangnya terjamin...”

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota-anggota KSM dimana berposisi sebagai individu-individu yang mandiri dalam mengembangkan usaha melalui proses berpikir melalui :

a, Pembentukan pengertian bahwa pengembangan usaha membutuhkan bantuan orang lain, yang mempunyai kemampuan yang sama dalam

menjalankan usaha yang dilakukannya serta penambahan permodalan menjadi sangat penting bilamana kita mau memajukan usaha.

- b. Pembentukan pendapat yaitu membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Pendapat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :
  1. Pendapat afirmatif atau positif adalah pendapat yang menyatakan keadaan sesuatu.
  2. Pendapat negatif adalah pendapat yang meniadakan, yang secara tegas menerangkan tentang adanya sesuatu sifat pada sesuatu hal.
  3. Pendapat modalitas atau kebarangkalian adalah pendapat yang menerangkan kebarangkalian, kemungkinan sesuatu sifat pada sesuatu hal.
- c. Penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusanKeputusan ialah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Disamping penguatan pada modal usaha, juga penguatan kelembagaan KSM kalau kita mengacu pada pemberdayaan ekonomi dalam arti luas, maka kebijakan pembedayaan ekonomi rakyat adalah pertama, pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada faktor produksi (khususnya modal). Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan

sekadar price taker. Ketiga, pelayanan pendidikan dan pelatihan (diklat). Keempat, penguatan industri kecil. Kelima, mendorong munculnya wirausaha baru. Dalam konteks ini, pemberian pinjaman modal hanya bagaian dari pemberian akses pada faktor produksi, dan pemberian akses terhadap faktor produksi juga hanya bagian dari pemberdayaan ekonomi.

Dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, ada 8 (delapan) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memanfaatkan Dana Bergulir secara berkelanjutan dengan jumlah anggota 80 orang sebesar Rp. 40.000.000 dimana masing-masing KSM rata-rata mendapatkan pinjaman Rp. 5.000.000. dengan bunga 1,5% perbulan selama 10 bulan, ini berarti setiap anggota KSM mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 500.000, sehingga setiap anggota KSM membayarkan pokok di tambah bunga sebesar Rp 57.500 / bulan, dan telah dikembalikan tanpa tunggakan yaitu pengembalian dana bergulir 100%.

Dari data yang ada sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 modal pinjaman yang beredar di masyarakat dengan modal awal Rp. 40.000.0000 dan sekarang mencapai Rp. 618.700.000 melalui kelompok sebanyak 64 dengan jumlah anggota penerima manfaat sejumlah 572 orang. Selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2010 – 2013 pengembalian dana bergulir mencapai 100 persen, artinya tidak ada yang macet, tentu ini karena komitmen bersama antara pengurus LKM, UPK dan KSM untuk meningkatkan keesejahteraan bersama.

Untuk Pinjaman dana bergulir tahun 2014 tingkat pengembaliannya atau *Repayment Rate* mencapai 95% dari total pinjaman, itu berarti ada tunggakan sekitar Rp. 5.250.000, untuk 7 Orang, yang rata-rata tunggakan hanya 1 kali cicilan. Dari hasil wawancara dengan Manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK) mengatakan bahwa :

“...Bahwa memang ada tunggakan anggota 5 orang dimasing masing KSM, yaitu KSM Adelweis 1 sebesar Rp. 1.000.000, KSM Adelweis 2 sebesar Rp. 1.250.000, KSM Seroja Rp. 1.000.000, KSM Tanjung 1 sebesar Rp. 1.000.000, KSM Anggrek 2 sebesar Rp. 500.000, serta KSM Tanjung 2 sebesar Rp.

500.000, pada umumnya anggota KSM yang nunggak tidak ada di tempat. Misalnya Anggota KSM Adelweis telah dilunaskan dari cadangan resiko dimana anggota tersebut telah meninggal dunia sebelum jatuh tempo, sehingga kesepakatan LKM melalui rapat utang tersebut dibayarkan melalui Cadangan Resiko Pinjaman, sementara yang lain tetap akan di tagih, hanya saja orang tersebut sudah tinggal di tempat lain, sehingga agak sulit untuk ditagih...”

Dari data tahun 2014 tersebut di atas ada sekitar Rp. 157.500.000, yang telah di pinjamkan

kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan akses pinjaman terhadap usaha yang mereka geluti, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga, ini sejalan dengan teori bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi, Seperti yang dikatakan

oleh Bloostrom dan Hettne dalam Arief Budiman (2000 : 19) :

“... Melihat perbedaan yang tampak antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam-macam dari aspek keterbelakangan. Persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan, yakni kekurangan modal...”

Adapun Neraca keuangan UPK per 31 Desember 2014, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	AKUN	Value
1	11010 - Kas	38.685.100
2	11020 - Bank	43.352.732
3	<b>11030 - Pinjaman KSM</b>	<b>183.597.500</b>
4	11031 - Cadangan Resiko Pinjaman	-1.700.000
5	11040 - Pinjaman Lain-lain	0
6	11050 - Pinjaman UPP1 (Macet)	0
7	12020 - Inventaris / Harta Tetap	0
8	12021 - Akumulasi Penyusutan Inventaris/Harta Tetap	0
	<b>Jumlah AKTIVA</b>	<b>263.935.332</b>
9	21010 - Hutang dari pihak III	0
10	21020 - Tabungan KSM	26.311.100
11	21030 - Alokasi laba untuk BKM	0
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>26.311.100</b>
12	31000 - Modal UPP1 (Macet)	0
13	31010 - Modal pinjaman bergulir	0
14	31020 - Modal PNPM	144.000.000
15	31030 - Modal dari sumber lain	100.000
16	31040 - Pemupukan Modal dari Laba	3.000.000
	<b>Jumlah Modal Modal (ROI)</b>	<b>147.100.000</b>
17	32010 - Laba/Rugi Tahun Lalu (+/-)	60.560.327
18	<b>32020 - Laba/Rugi Tahun Berjalan (+/-)</b>	<b>29.963.905</b>
	<b>Jumlah PASIVA</b>	<b>263.935.332</b>

Ketika pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat, maka pelaksanaan program ekonomi bergulir tersebut akan bagus, seperti yang diungkapkan oleh mas Puguh berikut ini:

“...karena dengan dana ekonomi bergulir sebenarnya kita bisa menilai tingkat kejujuran masyarakat sampai dimana, makanya sangat benar bahwa program ekonomi bergulir dijadikan barometer kegiatan PNPM yang ada di satu kelurahan, artinya ketika kegiatan PNPM ini tingkat pengembaliannya bagus 100%, terjadi perguliran yang baik, sehingga masyarakat di pandang jujur, maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan program yang lainnya, tapi ketika dana

bergulir ini macet di satu kelurahan, itu artinya masyarakat tidak jujur, dan wajar kalau mereka tidak dipercaya untuk mendapatkan dana tambahan atau BLM tambahan yang lainnya...”

Sebagaimana di ungkapkan oleh ketua KSM bapak Edi, bahwasanya masyarakat minang masih menganut paham :

“...tau ereng jo gendeng, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, tau ma nan patuik, ma nan elok jo nan buruk”. Artinya masyarakat cepat tanggap dengan sesuatu, bahwasanya jangan sampai orang lain menderita gara-gara kita. Mereka masih beranggapan bahwa tidak pantas ketika kita diberi keringanan dengan mendapat dana

pinjaman dari program ekonomi bergulir, usaha kita menjadi lancar dan hati kita sudah senang kemudian dengan sengaja tidak kita bayar, hal itu adalah sesuatu yang tidak pantas...”

Dari hasil kajian ada beberapa aspek yang mendorong tingkat pengembalian dana bergulir cukup baik di Kelurahan Padang Besi pada program ekonomi bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Aspek-aspek yang memunculkan kesadaran masyarakat tersebut antara lain adalah:

Kelembagaan LKM Mutiara dengan bentuk perhimpunan sebagai pimpinan kolektif kolegal, artinya segala sesuatu diputuskan atas dasar kesepakatan pimpinan kolektif LKM Mutiara yang berbasis pada sikap dan perilaku yang baik. Sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya. Kelembagaan yang di prakarsai oleh program yang sering disebut LKM (Lembaga Kesadayaan Masyarakat) dalam rangka mendukung proses pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan,

Kepemimpinan LKM Mutiara bersifat Kolektif Kolegal, yang berarti kordinator berfungsi mengkoordinir semua pimpinan LKM Mutiara, sehingga setiap keputusan adalah keputusan anggota Pimpinan LKM, yang diambil secara musyawarah mufakat dan tingkat kehadiran dalam membuat suatu keputusan 50% tambah satu, artinya minimal 5 orang anggota LKM hadir dalam setiap pertemuan. Pertemuan-pertemuan dilaksanakan oleh LKM Mutiara sebagai mana disampaikan oleh Kordinator LKM Mutiara bapak Irwan Chaniago sebagai berikut :

“...untuk efektif pelaksanaan kegiatan kami menyepakati jadwal rapat rutin sekali sebulan setiap minggu ketiga. Pada rapat ini kami membahas perkembangan pelaksanaan pekerjaan UP-UP, baik fisik, sosial dan dana bergulir dan merencanakan kegiatan untuk bulan selanjutnya. Sedangkan untuk hal-hal mendesak kami mengadakan rapat dengan undang dari sekretaris melalui SMS. Dalam rapat biasanya dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 orang...”

Kelembagaan adalah seperangkat aturan main yang dibuat oleh manusia sehingga interaksi antar orang dapat lebih terstruktur. Kelembagaan memfasilitasi kerja sama antar individu untuk mencapai tujuan bersama sehingga menciptakan integrasi sosial yang pada akhirnya menentukan maju tidaknya suatu masyarakat. Kelembagaan juga menentukan kinerja ekonomi suatu bangsa (Rahman, 2009 : vii).

Slamet (202: 30) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dikemukakan bahwa kepemimpinan penting dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti harus diakui secara timbal balik, misalnya sasaran yang dipimpin harus mengakui bahwa orang tersebut adalah pemimpinnya. Dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir dibutuhkan sosok pimpinan sebagai teladan, dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, ini tergambar dari penjelasan seorang anggota LKM bapak Sulmar Rusdi di Kelurahan Padang Besi tentang ciri-ciri pemimpin yang dapat diteladani sebagai berikut :

“...PNPM Mandiri Perkotaan menawarkan bantuan dalam bentuk kerjasama, swadaya, gotong royong, sumbangan pemikiran dan tenaga, Ketika anggota masyarakat yang duduk di PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah orang yang dikategorikan bisa dipercaya, karena nilai-nilai PNPM itu adalah kejujuran, sosialnya tinggi, keadilannya ada, dan masyarakat langsung percaya sehingga pengembalian dana bergulir menjadi lancar...”

Apa yang digambarkan oleh Pak Sulmar Rusdi di atas mengindikasikan bahwa program apapun yang dilaksanakan sangat tergantung dengan kepemimpinan, dimana pimpinan menjadi contoh yang baik. Ini sesuai dengan pendapat Slamet (2002:30) menyebutkan bahwa :

“... kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dikemukakan bahwa kepemimpinan penting

dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti harus diakui secara timbal balik, misalnya sasaran yang dipimpin harus mengakui bahwa orang tersebut adalah pemimpinnya...”

Dalam proses Pinjaman dana bergulir, ada aturan-aturan yang harus disepakati antara UPK dan Kelompok Swadaya masyarakat atau KSM dalam bentuk surat perjanjian pinjaman, antara lain : 1). Besaran Pinjaman, 2) Jangka Waktu Pinjaman, 3) Suku Bunga, 4) Jumlah Angsuran Pokok, 5) Tanggal Pengembalian, 6) Tanggung Renteng : sanggup untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kembali pinjaman kepada UPK-BKM

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Padang Besi bapak Zulhardin sebagai berikut:

“..... kami dari pihak kelurahan sangat mendukung program PNPM , dimana ini sangat membantu masyarakat dan kelurahan dalam pembangunan. PNPM setiap tahun ada anggarannya secara rutin, sehingga kegiatan pembangunan di kelurahan berjalan dan memang nampak hasilnya, sementara pemko padang karena keterbatasan anggaran belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, sehingga antara kelurahan dan LKM sepakat menjalin kordinasi setiap bulan sebagai laporan PNPM Mandiri sekaligus evaluasi perkembangan. Melalui pertemuan rutin antara kelurahan dan LKM kegiatan PNPM tetap dilaporkan dan diketahui oleh kelurahan, karena lurah itu tetap sebagai penanggungjawab, sehingga apapun masalah yang ada kita tau sehingga solusinya dapat kita carikan jalan keluar. Disamping itu disepakati bilamana ada anggota KSM tidak membayar maka pihak LKM melaporkan ke kita sehingga kita punya data, dan data itu kita pakai sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan kelurahan... artinya tidak dilayani sampai utangnya dibayar. Dan ini telah disampaikan kepada masyarakat. Kecuali hal-hal yang tidak terduga....mungkin ini juga dana PNPM tetap lancar kembali...imbas dari PNPM

dana KJKS yang ada sekarang juga lancar....”

Senada dengan ibu syamsini salah seorang ketua KSM yang terlibat dalam program ekonomi bergulir mengatakan bahwa :

“...sebenarnya begini pak, jauh sebelum adanya P2KP masyarakat banyak mendapatkan bantuan dana untuk usaha, hanya saja kurang lancar pengembaliannya, terkadang dia salah tanggapan tentang dana, menurut mereka ini adalah dana dari pemerintah ke masyarakat sifatnya gratis, sehingga mereka tidak terlalu peduli dalam pengembalian. Ketika saya dipilih oleh anggota menjadi ketua KSM, maka saya bilang..... saya mau asalkan kita semua benar-benar mau menjalankan usaha kita dengan benar dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Jadi dibuat kesepakatan dalam kelompok sebagai aturan bersama untuk di ikuti secara bersama..... karena dalam perjanjian pinjaman UPK ada istilah Tanggung Renteng, dimana bila sala satu anggota KSM tidak membayar angsuran... maka anggota lainnya membayarkan.”

Lebih lanjut ibu Syamsini mengatakan bahwa :

“ ...pergi pelatihan ke Jakarta tentang program ekonomi bergulir ini, karena kelurahan kami dianggap cukup baik dalam pengelolaan dana bergulir dan saya mendapat penjelasan bahwa dana ini memang harus dibayar, karena pemerintahan kita meminjam dana ke negara lain untuk memajukan kita. Kalau kita tidak membayar, tentunya negara kita akan berhutang ke negara lain. Oleh karena itu, makanya saya menyampaikan kepada anggota kelompok saya, bahwasanya dana tersebut memang harus dibayar, karena dana tersebut dipinjamkan pula ke anggota masyarakat lainnya, anggota yang mendengar tentang hal ini berfikir bahwa benar ini untuk masyarakat miskin agar pendapatan kita dapat bertambah melalui pinjaman modal dan digunaka sebaik-baiknya.”

Dari hasil wawancara tersebut diatas, ini sangat relevan dengan teori Harrod-Domar

dengan konsep penyediaan modal untuk investasi, dimana pemerintah dengan segala upaya untuk memajukan masyarakatnya, sekalipun itu meminjam dana dari World Bank, IDB maupun ADB, dalam upaya membangun perekonomian masyarakat kurang mampu.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk [sistem agama](#) dan [politik](#), adat istiadat, [bahasa](#), perkakas, [pakaian](#), [bangunan](#), dan karya [seni](#). Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat [Minangkabau](#) dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di [Nusantara](#) yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik, yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya,

Beberapa orang sosiolog mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk intraksi sosial yang pokok. Pola-pola kerjasama pada semua kelompok manusia, dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut sejak lama didalam kehidupan keluarga, kekerabatan, dan bentuk kerjasama tersebut dapat digerakkan untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan tersebut memberikan manfaat bagi semua. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorang terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-group-nya).

Soerjono Soekanto (1990:80) mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa:

“ Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri-sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna “

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pinjaman Dana Bergulir di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang) dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang telah peneliti peroleh, Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir membantu masyarakat dalam hal permodalan, pengembangan usaha serta meningkatkan pendapatan mereka, disamping itu membangun potensi yang mereka miliki dalam suasana kebersamaan dengan transparan dan bertanggungjawab.
2. Ada 3 aspek yang mempengaruhi tingkat pengembalian dana bergulir pada program ekonomi bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Pertama, Kepemimpinan, dimana masyarakat melihat para pemimpinnya (pelaku program) yang dapat diteladani atau di contoh, sikap dan perilakunya. Yang Kedua adalah aspek aturan, baik aturan UPK maupun internal KSM, yang saling mengikat satu sama lainnya. Yang ketiga aspek budaya, bahwasanya masyarakat merasa bahwa rasa malu kepada orang lain ketika mereka tidak membayar hutang, membuat mereka selalu setia untuk membayar dana bergulir program ekonomi bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Kemudian kejujuran dan keteladanan juga menjadi penyebab kenapa masyarakat khususnya anggota KSM di Kelurahan Padang Besi selalu mengembalikan dana bergulir ini supaya saudara mereka yang lain juga mendapat kesempatan menikmati dana pinjaman tersebut.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.

- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Laksono, Agung. 2013. *Karakteristik Kemiskinan Di Sumatera Barat dan Stratyegi Penanggulangannya*, Jakarta : Indomedia Global.
- Suparlan, Parsudi dalam Robertson, Roland (ed). 1988. *Agama : Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta : Rajawali.
- Sumardi, Mulyanto et.al. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta : Rajawali.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta : Raja Gravindo Persada.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Rajawali Press.
- Afrizal, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan)*, Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Prasetia Widya Pratama.